



EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PASAR PANORAMA DI KOTA BENGKULU

Rasmita¹, Achmad Aminudin,² Loesida Roeliana³

¹ Program Studi Administrasi Publik Fisip Unib

² Program Studi Administrasi Publik Fisip Unib

³ Program Studi Administrasi Publik Fisip Unib

ARTICLE INFORMATION

Received: Nov, 25, 21 Revised: Nov, 29,21 Accepted: Des, 12,21 Available online: Des,15,21

CORRESPONDENCE

E-mail: rasmita1799@gmail.com

ABSTRACT

Panorama Market is one of the pilot traditional markets in Bengkulu City. This market has a variety of classic problems that have not been resolved, namely the traders who sell on the roadside and control that is not routinely carried out. This research focuses on market management policies, namely Bengkulu City Regional Regulation Number 06 of 2020 concerning People's Market Management. This study aims to determine and describe the evaluation of the Panorama Market management policy in Bengkulu City. The research location was carried out at UPTD Pasar Panorama, Bengkulu City. The researcher uses a descriptive research type with a qualitative approach. Data collection techniques used include observation, interviews, and documentation. The results of the study include Human Resources, Money and Infrastructure which have a major influence on the effectiveness and efficiency in managing Panorama Market in achieving the management objectives of the People's Market, however, the impact of these policies has not been optimal due to sanctions and improper implementation. The conclusion of this study is that the policy is good and correct, but has not been effective in its implementation. This can be seen from the lack of supervision and firmness of the City Government and related parties in managing the Panorama Market. So that in this case efforts are needed to increase supervision and follow-up by the City Government in implementing regulations and sanctions in accordance with Bengkulu City Regional Regulation Number 06 of 2020 concerning Management of People's Markets.

KEYWORDS

Evaluation, Policy, Panorama Market.



PENDAHULUAN

Menurut Widjaja (2002:76) otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat salah satunya membangun fasilitas-fasilitas umum seperti pasar tradisional. Pada pembangunan dan pengelolaan sebuah pasar, perlunya sebuah manajemen tata kelola pasar yang baik dalam mewujudkan sebuah pasar yang tertib, sehat, aman, bersih dan teratur.

Tabel 1.1

Jenis - Jenis Tempat Dagangan di Pasar Panorama

| No | Keterangan | Jumlah |
|----|------------|--------|
| 1 | Kios | 538 |
| 2 | Los | 733 |
| 3 | Pelataran | 500 |

Sumber: UPTD Pasar Panorama Kota Bengkulu, 2021

Dilihat pada tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bengkulu telah mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 tahun 2020 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat khususnya pada Pasal 6 tentang Perencanaan Fisik dan Perencanaan Non fisik. Dilihat dari Teori Brigman dan Davis, pada aspek input meliputi SDM, Uang dan Infrastruktur, ditunjukkan faktanya di lapangan, fasilitas kios, los dan pelataran tersebut hanya diisi sebagian oleh para pedagang karena sebagian para pedagang masih menyalahi aturan dengan berdagang di badan jalan sehingga kios, los dan pelataran tersebut kosong, semrawut dan terbengkalai, sehingga mengakibatkan berkurangnya pendapatan daerah karena sedikitnya retribusi yang didapat. Hal tersebut dikarenakan adanya pungutan liar seperti sewa lapak, sewa jaga malam, sewa

lampu, sewa parkir, sewa kebersihan, dan sewa keamanan bagi para pedagang yang berjualan di badan jalan yang dilakukan oknum tertentu. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kota Bengkulu dan pihak-pihak terkait terus berupaya untuk mengelola Pasar Panorama walaupun usaha yang dilakukan selalu gagal. Namun, Hal tersebut tidak membuat Pemerintah Kota berhenti dalam menciptakan tujuan pasar sesuai dengan Perda Kota Bengkulu.

Belum memadainya sarana prasarana di Pasar Panorama sehingga para pedagang beralasan untuk berjualan di badan jalan dengan menggunakan kotak kayu, meja ataupun karung sebagai alas jualan. Selain itu juga kios, los dan pelataran yang disediakan Pemerintah Kota belum sesuai dengan jumlah pedagang yang ada, ukuran bangunan kios dan los yang belum sesuai dengan kebijakan, tidak semua pedagang memiliki STBHM, pembagian jenis barang dagangan tidak sesuai, serta minimnya lahan luas untuk aktifitas lapak parkir dan bongkar muat barang yang kerap dilakukan di badan jalan. Hal inilah yang menyebabkan kemacetan tidak dapat dihindari.

Adapun penelitian terdahulu sebagai acuan dalam penelitian ini yakni yang telah dilakukan oleh Yeka Purnama Sari (2015) dengan judul Implementasi Kebijakan tentang Penetapan Pasar Panorama sebagai Pasar Tradisional Percontohan di Indonesia. Hasil penelitiannya adalah Pemerintah Kota Bengkulu yang terus menata ulang beberapa pasar yang ada di Bengkulu salah satunya Pasar Panorama untuk membuat Pasar Panorama lebih bersih dan tertata rapi serta melakukan pembangunan Pasar Panorama untuk menjadi salah satu pasar percontohan di Indonesia.

Kemudian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Panorama di Kota Bengkulu.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Adapun informan yang diperoleh berjumlah 11 orang meliputi Kepala UPTD Pasar, Staff UPTD Pasar (penagih retribusi dan staff keamanan), juru parkir, koperasi, pedagang kios pecah belah, pedagang los bumbu, pedagang ayam, pedagang buah, pedagang ikan dan pedagang sayur. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi sedangkan teknik analisis data yang dilakukan yakni dengan pengumpulan data, reduksi data dan penyajian data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Aspek Input

Berdasarkan aspek yang digunakan untuk melihat Teori Brigrman dan Davis, Input dibagi menjadi 3 sub yakni sumber daya manusia sebagai pelaksana atau pelaku kegiatan, uang sebagai pelengkap seperti membayar retribusi sewa kios, los dan pelataran, retribusi parkir sementara infrastruktur sebagai penunjang kegiatan meliputi fasilitas atau sarana prasarana. Adapun fasilitas di Pasar Panorama yang dirusak oleh Pedagang, salah satunya pagar pasar seperti pada gambar dibawah ini.

Gambar 1
Pagar Pasar yang Dirusak Pedagang



Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2021

Berikut ini hasil wawancara dari salahsatu informan berinisial RB yakni sebagai berikut :

“berbicara soal siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan Pasar, pastinya Pemkot, Disperindag, UPTD Pasar. Pemerintah sebagai atasan akan membantu kami dalam menertibkan pasar, makanya perlu adanya Perda itu dek, supaya kita mengetahui tugas pokok fungsi kita itu sendiri. kalau Disperindag itu tugasnya untuk mengkoordinasi dan mendampingi penertiban pasar dibantu Satpol-PP sebagai petugas keamanan. Lalu lintas pasar dan parkiran itu sekarang menjadi kewenangan Dishub tidak ada campur tangan kami di UPTD dek. Apalagi sekarang banyak pedagang musiman dari luar daerah seperti dari Curup, Kepahiang, Pasmah yang bawa barang dagangan pakai mobil itukan illegal, kenapa pihak berwenang tidak menindaklanjuti, jadi kami tidak bisa menagih retribusinya itulah jadinya pihak UPTD rugi karena tidak ada pemasukan. Sedangkan, pedagang yang berjualan bebas di luar Pasar itu ribuan, tidak bisa kami tagih. Dana PAD itukan dari retribusi seperti kios, los, pelataran, parkir, kebersihan, MCK. Kalo sewa itu ada diluar pasar dek, misalnya sewa lapak, lampu, jaga malam, nah itu diluar urusan UPTD Pasar karna illegal, kami kalo nagih pakai karcis, jadi puntung karcis itu nanti diserahkan ke Disperindag sebagai tanda bukti lunas retribusi. Kalau dari pemerintah sudah disediakanya fasilitas pasar dek cuma belum sepenuhnya ada, yang ada seperti kantor UPTD, pos pemadam, pos polisi, masjid, instalasi listrik, sarana pengelolaan kebersihan, sarana air bersih, WC umum. Dan untuk lahan khusus seperti parkir atau bongkar muat barang belum ada dek, dan masih dilakukan dijalan.”

Hasil penelitian tersebut didapat dari hasil wawancara menyebutkan bahwa Pemerintah Kota bersama pihak terkait telah melakukan pengelolaan Pasar Panorama dengan pedagang yang berdagang dibadan jalan namun diabaikan karena mereka tetap tidak ingin pindah ke dalam pasar serta Pemerintah Kota juga menyiapkan fasilitas yang ada di Pasar Panorama meskipun

belum memadai. Namun, Peneliti juga mendapatkan hasil wawancara yang berbeda dengan mewawancarai para pedagang salah satunya pedagang berinisial AN yang mengatakan bahwa :

“ibu kurang tau siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan pasar nak. Ibu disini taunya jualan, bayar sewa lapak, kebersihan, keamanan itu saja. Sedangkan sarana prasarana nih belum ada semuanya nak, jumlah kios dan los, itukan tidak seimbang untuk semua pedagang disini. Makanya banyak pedagang yang jualan di badan jalan, ditambah lagi di dalam pasar itu tidak ada pembeli, jadikan tidak ada pemasukan bagi kami pedagang kaki lima nih nak.”

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa beberapa informan mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Pasar Panorama, seperti Pemerintah Kota, UPTD Pasar, Disperindag, Dishub, Satpol-PP yang memiliki tugas pokok dan fungsinya masing-masing sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu jugam dana PAD yang dihasilkan diperoleh dari dana retribusi seperti retibusi kios, los, pelataran sedangkan banyaknya sewa illegal seperti sewa lapak, jaga malam, kebersihan, keamanan, lampu dan parkir, Sedangkan untuk infrastruktur di Pasar Panorama semuanya belum terpenuhi seperti lahan khusus parkir, tempat promosi dan bongkar muat belum ada dan masih dilakukan di jalan sehingga rentan menyebabkan kemacetan di Pasar. sehingga dapat dikatakan isi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat sudah baik namun pelaksanaannya di lapangan belum optimal.

2. Aspek Process

Process, memfokuskan pada penilaian kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat meliputi efektifitas dan efisiensinya dalam pengelolaan Pasar Panorama di Kota Bengkulu sesuai yang dilihat dari efektifitas, metode atau cara dalam

mengelola jam operasional pasar, mengelola kios, los, pelataran, mengelolapedagang dan STBHM serta mengelola parkiran.

Berikut ini adalah hasil wawancara dari salah satu informan berinisial RB yakni sebagai berikut:

“pengelolaan jam operasional pasar, itu sebenarnya untuk seluruh pedagang di Pasar tapi masih ada pedagang yang berjualan di badan jalan jadinya. Tapi sekarang lah dibuat palang tiang jam pasar, itu dekat simpang pas nak masuk jalan kedondong ditulis mulai darijam06.00 pagi sampai jam 06.00 sore. Tapi nak dibuat tidaknya, pedagang juga masih ada yang berjualan 24 jam dek tidak ada tindakan atau ketegasan dari Satpol-PP. terutama pedagang musiman yang datang, dan jualan bebas di badan jalan tanpa memberitahu kantor. Di jalan itu kan Dishub tidak melakukan penertiban. Seperti Lantas atau kepolisian itukan ada Peraturan Pemerintah, kenapa mereka tidak menggunakan PP itu untuk menilang atau menindaklanjuti pedagang yang dibadan jalan, jadi, Perda dan PP-nya ada tapi sanksinya tidak diberlakukan dan pelaksanaannya kurang tegas. Terus juga ngelola kios dan los. Itukan kios dan los nya dibagi perblok. Nah itu, kami data dulu jumlah pedagangnya, jadi mereka yang nak nempati kios dan los kan bisa di data dengan ngurus dulu SKM sekarang namanya. Jadi mereka bayar sewa retibusinya dek, untuk tarif kios dan los beda tiap bulannya. Sudah didata pedagang tadi, nah mereka nempatinya harus sesuai jenis jualan mereka. Misalnya barang jadi itu di kios, barang basah seperti sayur, daging, ikan itu di los dan dagangan campuran itu di pelataran dek.jadi mereka yang nak nempati kios dan los Nah yang pedagang menggunakan SKM milik orang lain, pedagang yang melakukan jual beli dibawah tangan, itu kami panggil dek, datang ke kantor, kalau mereka tidak bisa ngasih penjelasan yang jelas, maka kami segel dan mereka harus melakukan perbaikan administrasi serta membayar retribusinya dan langsung balik nama pemilik sebenarnya. Tapi sekarang lah banyak pedagang jualan di jalan semua jadinya kan kios dan los banyak kosong nganggur saja. Apalagi

parkiran di jalan, memang belum ada lahan khususnya jadi masih banyak parkir yang di jalan, itulah sering buat macet dek. Melihat kondisi seperti itu, ya kami tegur baik-baik kami himbau untuk tertib di pasar, pindah lapak jualan ke dalam, apalagi pelataran yang belakang pos pemadam itu kan masih banyak kosong. apalagi ada 1 suku yang sulit diatur yang kalau kami melakukan penertiban itu, mereka ga terima dan melakukan perlawanan dengan ancaman fisik. Jumlah personil kami tidak cukup mengatur mereka dek. bukan kita yang ngatur tapi mereka malah ngatur kami, marah-marah kalau ditegur. Itulah penertiban pasar nih tidak pernah berhasil.”

Gambar 2
Jam Operasional Pasar di Simpang Jalan Kedondong



Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2021

Hasil penelitian tersebut didapat dari hasil wawancara menyebutkan bahwa pegawai Kantor UPTD telah melakukan tugasnya dengan baik hanya saja masih ada pedagang yang melawan jika ditertibkan menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pihak UPTD Pasar tidak tegas dalam melakukan pengelolaan Pasar Panorama, seperti yang disampaikan oleh informan berinisial YZ, yakni sebagai berikut :

“Kalo seperti pedagang kaki lima kaya kami ini dek tidak merhatikan jam pasar, karna disinilah kami bisa makan. Cuma siang ayuk balik karna sepi pembeli, sorenya ayuk jualan lagi. kalau cak ayuk yang jualan di jalan nih dek bayar sewa lapak itu perhari seperti yang ayuk omong tadi, jadi ayuk izin dulu ke tukang parkir karna makai lapak parkir tapi ayuk idak seharian nian jualan, jualan jam 6

jam 9 atau 10 la balik dek. Tempat jualan nih juga bayar sewanya dek, untuk tarifnya itu beda-beda karena tergantung tempatnya. Sedangkan mengelola pedagang setahu ayuk razia itu dek, memang sebenarnya salah kami pedagang yang jualan di jalan tapi karna diluar pasar nih lebih banyak pembeli, iya jadinya kami memilih jualan di jalan dan juga pembeli kan tidak sulit mau masuk ke dalam pasar berbelanja, cukup diatas motor bisa belanja. Kalo di dalam pasar iya harus pakai surat izin seperti surat keterangan menempati, itu buatnya di kantor pasar dek. sekarang banyak parkir illegal yang di jalan, jadi mereka nih berbagi lahan. Karna minimnya lahan luas untuk parkir jadi jalan nih dibuat parkir itulah sering macet dek.” Berdasarkan hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa jam operasional Pasar yang mengatur jam operasional pasar dari pukul 06.00–18.00 WIB, namun berdasarkan observasi, ternyata Pasar Panorama buka 24 jam terutama pedagang di Jalan Belimbing dan Jalan Semangka. Dalam pembagian kios dan los berdasarkan jenis dagangan, namun sebagian pedagang menyalahi aturan, adanya kewajiban membayar retribusi kios, los dan pelataran yang dilakukan oleh UPTD Pasar Panorama, serta karena keterbatasan lahan, menimbulkan parkir illegal yang membuka lapak parkir di badan jalan mengakibatkan lalu lintas di Pasar Panorama menjadi macet.

3. Aspek Output

Output memfokuskan pada penilaian hasil atau proses kebijakan, yang mengacu pada evaluasi kebijakan, maka output yang dihasilkan mengarah pada tercapai tidaknya suatu tujuan dalam kebijakan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat. Berikut disampaikan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan informan berinisial ZK sebagai berikut :

dari dulu sampai sekarang, Pasar Panorama nih tidak pernah rapi dan teratur dek. Bagaimanapun penertiban, masih seperti itulah. Iya sehari rapi bersih, besoknya mengulang lagi jualan di jalan. Tetapi kami juga tidak sepenuhnya menyalahkan pedagang dek, karena Pemerintah juga

kurang ketegasan. Kami disini juga kan ngikuti aturan atasan.”

Gambar 3 Pasar Panorama yang Tidak Teratur



Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2021

Hasil penelitian tersebut didapat dari hasil wawancara menyebutkan bahwa belum pernah tercapai tujuan Pemerintah salah satunya dalam mewujudkan Pasar Panorama yang bersih, rapi dan teratur. Hal ini juga dibenarkan oleh beberapa pedagang yang berinisial YR yang menyebutkan bahwa :

“pastinya keinginan masyarakat dek, maunya Pasar yang bersih dan tidak semrawut, jadi kalau transaksi jual beli jadinya enak. Tapi pendapat orang beda- beda dek, apalagi pedagang sekarang semuanya saja tidak mau diatur. Nurut juga sehari itulah, besoknya kumat lagi. Coba adek tengok pedagang yang jualan di Jalan Kedondong, itukan lah parah nian lah makan jalan jadi sering macet. Apalagi mobil besar seperti Truk sering melintas. Harusnya sesama pedagang juga saling mengerti. Kalau jalan macet, kan yang susah pedagang juga karena pembeli mau nawar barang tidak bisa lewat. Dan juga Pemerintah lebih tegas lagi mengawasi pedagang, control terus pedagang yang sulit diatur. Jangan sanksi dalam aturan saja tertulis tapi tidak adaketegasanpenerapannya, inilah yang buat pedagang banyak melanggar dek.”

4. Aspek Outcomes

Sebuah kebijakan atau program bisa saja gagal dalam memperoleh dampak yang diharapkan walaupun proses implementasi berhasil mencapai outcomenya begitu juga sebaliknya. Meskipun gagal dalam mewujudkan outputnya, namun Outcomes memfokuskan pada dampak yang ditimbulkan dari kebijakan Pemerintah meliputi Mendapatkan perlindungan terhadap pasar sebagai entitas ekonomi, pedagang dan konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa benar adanya bahwa tujuan-tujuan pengelolaan Pasar yang ada dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat belum sepenuhnya tercapai. Namun hal tersebut, tidak lepas dari perhatian Pemerintah dalam menanggapinya walaupun selalu mengalami kendala dalam pengelolaan Pasar.

Berikut ini disampaikan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan beberapa informan yang berinisial RB sebagai berikut :

“jadi dek setiap pembangunan itu harus memperhatikan lokasi dan titik ruangnya. Karena lokasi itu menentukan peminat masyarakat, misalnya Pasar itukan sudah ada label harganya tidak bisa kita tawar seperti di Pasar Panorama ini sedangkan kalo Keamanan di Pasar nih sedanglah, ada sesekali yang kehilangan, tapi kan ada pos polisi yang ditengah pasar itu dek. kalo kebersihan dan tata letak pasarnya nih semrawut dek jadi kurang enak dipandang. Apalagi yang pedagang jualan di jalan itu. Seperti yang bapak katakan tadi, kalau kami melakukan penertiban di pasar, ada sebagian pedagang itu yang melawan dengan kekerasan. Sedangkan personil kami kurang, tidak bisa melayani pakai kekerasan juga dek, itu melanggar aturan. ruang tera timbangan belum ada di Pasar dek. Memang kalo keamanan pangan selalu di cek, di ambil sampel barangnya dan diperiksa di kantor pasar juga bisa. tetapi semenjak Covid, la jarang BPOM menge-cek keamanan dek.”

Gambar 4
Pemeriksaan Makanan oleh BPOM



Sumber: WFSD-2020-di-Pasar-Panorama-

Bengkulu

Hasil penelitian tersebut didapat dari hasil wawancara menyebutkan bahwa lokasi pasar sangat menentukan pembeli dalam berbelanja ditambah lagi dengan harga barang dagangan yang murah dan mudah terjangkau sementara untuk keamanan di Pasar cukup aman. Hal ini juga dibenarkan oleh beberapa pedagang yang berinisial YR yang menyebutkan bahwa :

“ kalau ayuk dek lebih suka belanja di pasar tradisional daripada pasar modern. Karno di pasar tradisional ini bisa tawar menawar, harganya juga murah, barang dagangannya lengkap dan lokasinya cukup strategis, angkot sekarang juga sudahbanyak dek bisa mengantar penumpang sesuai titikny.Memang kalau pasar tradisional agak kotor dan tidak tertata rapi dek, tapi kalau seperti ayuk yang dagang disini dek, tidak memikirkan bersih, kotor, besar, kecil tempatnya, yang penting ada pemasukan setiap harinya dek.kami pedagang di pasar ini dek berhak mendapatkan fasilitas pasar misalnya menempati kios, los dan pelataran. tetapi harus bayar retribusinya. Kalau konsumen ini dek maunya barang yang murah, bagus, dan banyak. Apalagi soal timbangan dek, mereka maunya minta lebihkan timbangan.Pembeli nih juga kalau belanja itu dek pasti milih-milih, wajar sih kalau mereka begitu karna kan keamanan pangan sangat penting.”

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa perlindungan pasar terhadap entitas ekonomi, pedagang dan konsumen yang diketahui beberapa informan bahwa Pasar Panorama terbilang cukup aman karena adanya keamanan dari Polsek, adanya keamanan Pangan

dari BPOM, harga barang dagangan yang murah serta lokasi strategis dekat dengan pemukiman masyarakat.

KESIMPULAN

Dalam pengelolaan Pasar Panorama masih belum optimal pelaksanaannya, Pemerintah Kota dan pihak terkait kurang rutin melakukan pengawasan dan penertiban Pasar Panorama khususnya pedagang yang berdagang di badan jalan dan maraknya pungli. Hal ini menyebabkan kurangnya pemasukan dana Pendapatan Asli Daerah (PAD). Belum lengkapnya sarana prasarana di Pasar khususnya lahan parkir dan lahan bongkar muat barang mengakibatkan Pasar Panorama tidak tertata rapi, bersih, sehat dan nyaman.

Adapun hal-hal yang perlu dilakukan untuk pengelolaan Pasar Panorama kedepannya yakni Perlunya tindakan tegas, pengamanan ketat serta pengawasan dari Pemerintah Kota dan OPD tertentu terhadap situasi dan kondisi Pasar Panorama.

DAFTAR PUSTAKA

- Brigman & Davis. (2000). *Australian Policy Handbook*, (diterjemahkan oleh Achmad Fawaid ; Analisa Kebijakan Publik : Konsep, teori dan aplikasinya). Semarang: Universitas Diponegoro, hal 130.
- H.A.W.Widjaja. (2002). *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat
- Sari, Yeka Purnama.(2015). *Implementasi Kebijakan Tentang Penetapan Pasar Panorama sebagai Pasar Tradisional Percontohan di Indonesia*. Bengkulu.